

# ADMINISTRASI PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

## Gambaran Umum Organisasi BPBD

### A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan PERDA Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan Kelembagaan Lain Provinsi Sulawesi Selatan, maka stuktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon Ib (secara ex-officio), 1 (satu) orang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIa, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang setingkat eselon IIIa dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian/Seksi setingkat eselon IVa.

Secara terperinci diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Program.

#### 2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari Sub Koordinator Seksi Pencegahan dan su Koordinator Seksi Kesiapsiagaan.

#### 3. Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari Sub Koordinator Seksi Kedaruratan dan Sub Koordinator Seksi Logistik.

#### 4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

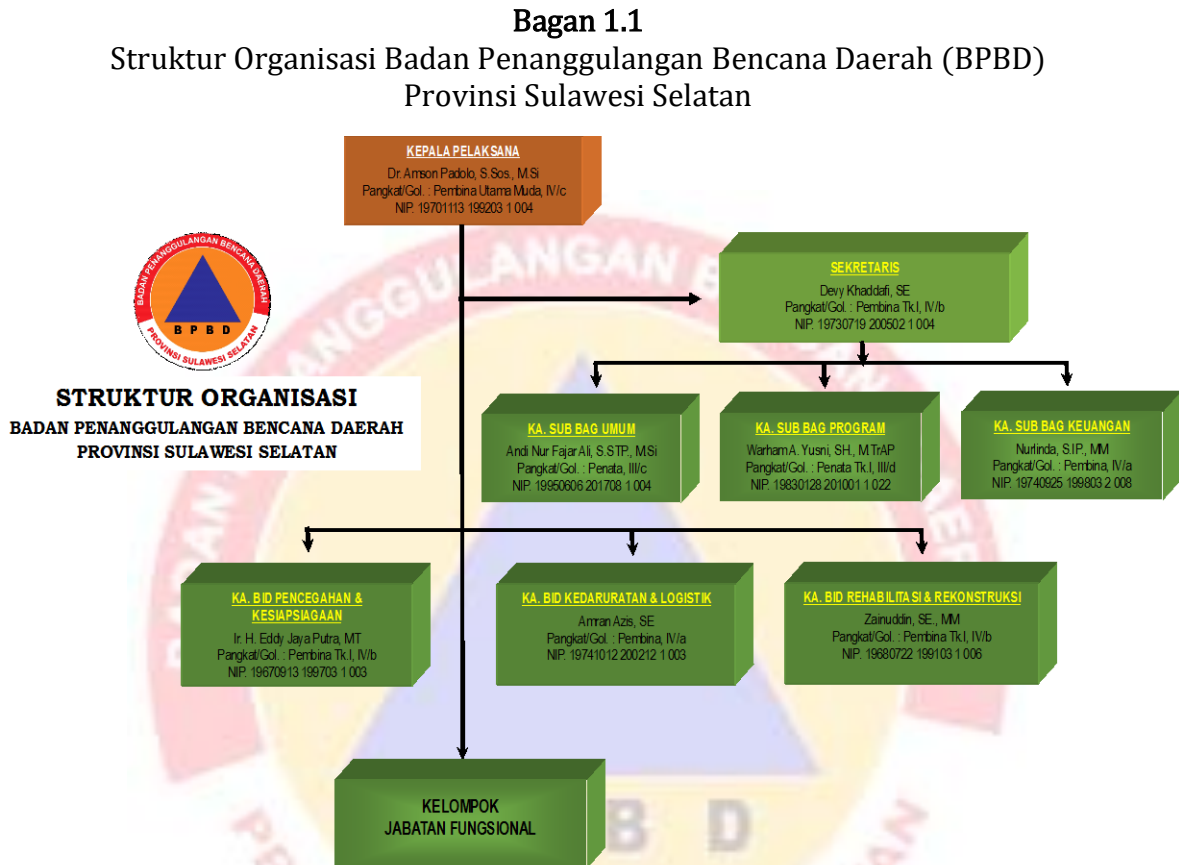
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi dan Sub Koordinator Seksi Rekonstruksi.

Berdasarkan pada Eselonisasi, maka Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari:

1. Kepala Badan (Eselon Ib) 1 orang
2. Kepala Pelaksana Badan (Eselon IIa) 1 orang.
3. Sekretaris (Eselon IIIa) 1 orang
4. Kepala Bidang (Eselon IIIa) 3 orang

5. Tim Pengarah (Non Eselon)
6. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Koordinator (Eselon IVa) 9 orang.
7. Staf sebanyak sesuai kebutuhan.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat dilihat pada bagan berikut ini.



## B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan, maka BPBD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dalam hubungan tersebut, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penanggulangan bencana, yaitu

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang bantuan;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana lainnya;
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana sesuai petunjuk dan arahan Gubernur Sulawesi Selatan.

Fungsi unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Unsur Pengarah

Fungsi unsur pengarah adalah:

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana;
- b. Memantau; dan

c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## 2) Unsur Pelaksana

Fungsi unsur pelaksana adalah:

a. Koordinasi;

b. Komando; dan

c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsian Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, dengan rincian sebagai berikut:

### 1) Kepala Pelaksana

a. Tugas:

Membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana.

b. Fungsi:

- Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan keuangan;
- Pengekoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2) Sekretaris

a. Tugas:

Mengekoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya serta kerjasama.

b. Fungsi:

- Pengekoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD;
- Pengekoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD;

- Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;
- Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;
- Pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi unsur penganan BPBD;
- Pengoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.

### 3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

#### a. Tugas:

Melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kejadian bencana.

#### b. Fungsi:

- Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- Penyiapan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana;
- Penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan kejadian bencana;
- Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### 4) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

#### a. Tugas:

Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana, mengumpulkan data secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, korban bencana, kerusakan, kerugian, serta mengadakan, menerima, menyiapkan, dan menyalurkan bantuan peralatan dan logistik saat terjadi bencana.

#### b. Fungsi:

- Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana;
- Melaksanakan kegiatan dengan pola penyelenggaraan sistem komando tanggap darurat bencana;
- Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

a. Tugas:

Mengordinasikan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi fisik terbatas perbaikan lingkungan daerah bencana, sarana dan prasarana umum, penyiapan rancangan konstruksi tahan gempa.

b. Fungsi:

- Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Per Desember 2024, jumlah PNS di BPBD adalah sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) orang dan perempuan sebanyak 8 (Delapan) orang.

Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S2 sebanyak 13 (Tiga Belas) orang, S1 sebanyak 18 (Delapan Belas) orang, kemudian SLTA sebanyak 4 (Empat) orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, BPBD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik. Adapun selengkapnya dapat dilihat dalam tabel pada halaman selanjutnya.

**TABEL 1.1**  
**DATA PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1.	AMSON PADOLO, S.Sos., M.Si NIP. 19701113 199203 1 004 Pembina Utama Muda, IV/c	KEPALA PELAKSANA BPBD
2.	DEVY KHADDAFI, SE NIP. 19730719 200502 1 004 Pembina Tk.I, IV/b	SEKRETARIS
3.	H. EDDY JAYA PUTRA, ST., MT 19670913 199703 1 003 Pembina Tk.I, IV/b	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
4.	AMRAN AZIS, SE NIP. 19741012 200212 1 003 Pembina, IV/a	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
5.	ZAINUDDIN, SE., MM NIP. 19680722 199103 1 006 Pembina Tk.I, IV/b	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
6.	WARHAM A. YUSNI, SH.,M.Tr.AP NIP. 19830128 201001 1 022 Penata Tk.I, III/d	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
7.	LA ODE SAIFUL M, S.T. 19761211 201101 1 005 Penata, III/c	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA
8.	MUHAMMAD DODDY RAHMAT, S.T, MM. 19800331 200904 1 003 Penata Tk.I, III/d	ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA
9.	A. WAHID RASJID AZIS, S.H., M.H. 19860613 201001 1 004 Penata Tk.I, III/d	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA
10.	NURLINDA, S.I.P., M.M. 19740925 199803 2 008 Penata Tk.I, III/d	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
11.	SULAYMAN PATITTINGI, S.E. 19720512 199303 1 007 Penata Tk.I, III/d	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI MUDA SELAKU
12.	ANDI NUR FAJAR ALI, S.STP .,M.Si NIP. 19950606 201708 1 004 Penata Muda Tk.I, III/b	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
13.	ANDRIYANI, S.E., M.A.P 19691208 199203 2 008 Penata Tk.I, III/d	AHLI MUDA – ARSIPARIS
14.	GERSONY MIRI, ST.,M.Si NIP. 19780721 200804 1 002 Pembina, IVa	Pengelola Program dan Kegiatan
15.	KALLANG, SE., M.Si NIP. 19720815 199303 1 010 Pembina, IV/a	Penata Layanan Operasional
16.	SALMAH, S.H. 19670905 200604 2 010 Penata Tk.I, III/d	Pengolah Data dan Informasi
17.	MASRIUDDIN, S.E., M.M. 19750727 200901 1 008	Penelaah Teknis Kebijakan

	Penata Tk.I, III/d	
18.	ASMAWATI, S.Sos. 19760109 200701 2 019 Penata Tk.I, III/d	Penata Layana Operasional
19.	KHADIRAH, S.T. 19790425 201101 2 002 Penata, III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
20.	ANDI MIFTAHUDDIN, S.ST. 19901209 201402 1 001 Penata, III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
21.	SUKMAWANTI, S.Psi 19900308 202203 2 005 Penata Muda, III/a	Penelaah Teknis Kebijakan
22.	ADHYATMA, S.ST., M.Tr.AP 19880608 201504 1 002 Penata Muda Tk.I, III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
23.	LILISARI RAMADHANI, S.ST. 19890422 201402 2 003 Penata, III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
24.	MUTAQDIR RASUL, S.ST. 19870708 201402 1 002 Penata, III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
25.	ANDI INSANUL KAMIL, S.ST. 19890704 201402 1 005 Penata, III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
26.	HASRUL AMRAN, S.M. 19850502 201001 1 036 Penata Muda Tk.I, III/b	Penata Layanan Operasional
27.	EMILDA BAHARUDDIN, S.Sos. 19800315 200003 2 001 Penata Muda, III/a	Pengolah Data Dan Informasi
28.	ABDUL RAHMAN S.ST NIP. 198809112015041001 Penata, III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
29.	ANDI ARAS HALIM 19830908 200801 1 005 Pengatur Tk.I, II/d	Pengadministrasi Perkantoran
30.	ISAK TORANO 19821226 200801 1 011 Pengatur, II/c	Pengadministrasi Perkantoran
31.	SYAMSUL BAHRI 19830809 200801 1 003 Pengatur, II/c	Pengadministrasi Perkantoran
32.	ANDI JUSTAN, A.md 19781231 200801 1 007 Pengatur Tk.I, II/d	Pengadministrasi Perkantoran
33.	WAWAN EKA SETIAWAN 19810322 201001 1 012 Pengatur Muda Tk.I, II/B	Pengadministrasi Perkantoran
34.	YANDI KINANTAKA, S.ST 19921104 201903 1 015 Penata Muda, III/a	Penelaah Teknis Kebijakan
35.	ANSHARI SHALEH ISMAIL, S.ST 19891216 201504 1 001 Penata Muda Tk.I, III/b	Penelaah Teknis Kebijakan



Tabel 1.2  
 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
 Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin

<i>No.</i>	<i>Jenis Kelamin</i>	<i>Jumlah</i>
1.	Laki-laki	27
2.	Perempuan	8
<b>JUMLAH</b>		<b>35</b>

Grafik 1.1.  
 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
 Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 1.3  
 Jumlah Pejabat Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi  
 Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	4	-	4
3.	IV	2	1	3
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

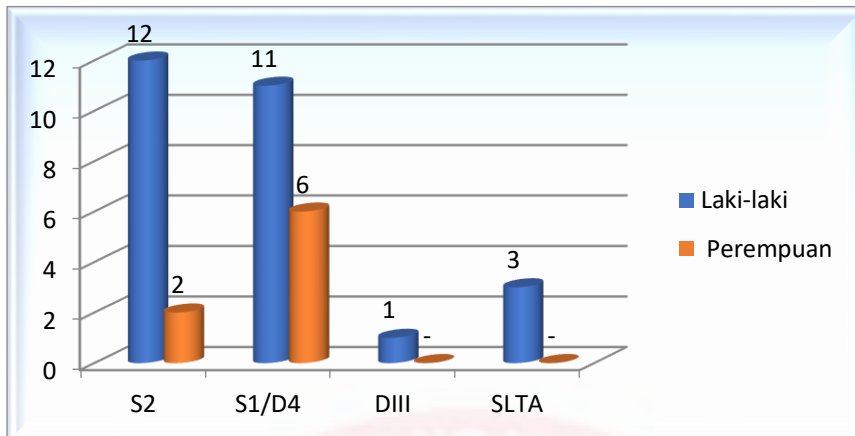
Grafik 1.2.  
Jumlah Pejabat Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 1.4  
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Golongan & Jenis Kelamin

Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
IV/d	-	-	0
IV/c	1	-	1
IV/b	3	-	3
IV/a	3	2	5
<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
III/d	6	3	9
III/c	8	1	9
III/b	1	1	2
III/a	1	1	2
<b>JUMLAH</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>22</b>
II/d	3	-	3
II/c	-	-	-
II/b	1	-	1
<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>35</b>

Grafik 1.3.  
 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
 Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Golongan & Jenis Kelamin



Tabel 1.5  
 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
 Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Pendidikan & Jenis Kelamin

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
S2	12	2	14
S1/DIV	11	6	17
DIII	1	0	1
SMA	3	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>35</b>

Grafik 1.4  
 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  
 Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Pendidikan & Jenis Kelamin

